

## **BAB II**

### **PERAN DAN NILAI STRATEGIS MINYAK BUMI DALAM POLITIK LUAR NEGERI AS**

Dalam membicarakan kehidupan sehari-hari, salah-satu tema yang sering diangkat adalah minyak bumi dan produk turunannya. Tidak bisa dipungkiri, minyak merupakan komoditas yang keberadaannya dianggap vital mulai dari level mikro di tingkat rumah tangga sampai ke level makro di tingkat negara. Kegunaan produk turunan minyak bumi yang beragam mulai dari penerangan, bahan bakar kendaraan, sumber tenaga listrik, pelumas, aspal, pewarna, dan segala bahan olahan kimia lainnya membuat minyak memainkan peran utama dengan porsi besar dalam perekonomian dunia saat ini, menjadikannya sebagai bahan mentah yang paling banyak diperebutkan oleh banyak negara baik melalui jalan yang legal dan diplomatis maupun melalui jalan kekerasan seperti perang.

Namun meski minyak bumi telah memainkan peran sentral dalam kehidupan manusia selama lebih dari 150 tahun, terdapat beberapa faktor yang bersifat dinamis seperti produksi, akses, atau jumlah cadangan, yang menyebabkan pemerintahan di suatu negara (dalam hal ini AS) mengubah kebijakan terkait minyak bumi, atau yang menyebabkannya menerapkan strategi geopolitik tertentu untuk bisa memenuhi kepentingannya seperti menjamin pasokan minyak untuk keperluan di dalam negeri. Bab ini akan menjelaskan tentang bagaimana minyak bumi muncul sebagai komoditas vital dalam perdagangan internasional dan kaitannya dengan sikap politik dari negara (khususnya AS) dalam menyikapi dinamika tersebut. Bab ini juga akan menjelaskan nilai strategis minyak bumi sebagai alat tawar suatu negara atau sebagai tujuan dari politik geostrategi yang dijalankan oleh suatu negara.

## A. Sejarah Minyak Bumi dan Kaitannya Dengan Politik Luar Negeri AS

Minyak bumi mulai menjadi komoditas vital dalam perdagangan internasional di pertengahan abad ke-19 seiring dengan berkembangnya teknologi di era tersebut. Kegunaan produk turunan minyak bumi seperti minyak tanah, bensin, minyak diesel mulai beragam, dari sebatas penerangan, lalu menyebar ke otomotif dan industri. Sebagai salah-satu negara industri terbesar di dunia, ketersediaan minyak bumi adalah sangat vital bagi kelangsungan ekonomi di AS. Oleh karenanya minyak bumi menjadi salah-satu faktor utama dari pembuatan kebijakan luar negeri pemerintah AS. Sub-bab ini akan membahas mengenai sejarah bagaimana minyak bumi menjadi komoditas vital dunia dan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi kebijakan pemerintah AS terkait minyak bumi baik di dalam dan di luar negeri.

### A.1. Minyak Bumi dan Politik Isolasi AS Sebelum Perang Dunia I

Meski minyak bumi dan produk turunannya sudah mulai digunakan oleh manusia sejak abad ke-6 SM oleh bangsa Mesopotamia, dimana kegunaannya tidaklah beragam dan terbatas pada wilayah dimana minyak mudah ditemukan di permukaan tanah. (Moorey, 1994) Di AS, minyak bumi secara alami sudah digunakan oleh bangsa Indian untuk pengobatan serta hiasan pribadi. Minyak bumi dalam bentuk murni atau minyak mentah di awal abad ke-19 hanya bisa ditemukan dalam jumlah yang terbatas, dikarenakan belum adanya teknik ekstraksi minyak bumi dari bawah tanah. (McNally, 2017)

Minyak bumi mulai berperan sebagai komoditas vital di pertengahan abad ke-19 seiring dengan kemajuan ilmu teknik kimia. Produk turunan minyak bumi pertama yang dihasilkan dari proses penyulingan adalah parafin di tahun 1830 (Wonning, 2015) yang diikuti oleh penemuan minyak tanah atau *kerosine* untuk penerangan. Tidak lama setelah

minyak tanah ditemukan, bensin dan minyak diesel ditemukan di penghujung abad ke-19. (Maugeri, 2006)

Di saat minyak bumi mulai menjadi komoditas vital dalam perdagangan internasional di pertengahan abad ke-19, pemerintah AS di era itu masih menerapkan kebijakan politik isolasi, dimana letak geografis AS yang terpisah dari Eropa memungkinkan masyarakatnya menghindari konflik antar kekuatan besar di Eropa dan mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka secara swa-sembada karena ekonomi AS saat itu masih didominasi oleh sektor pertanian. Oleh karenanya, belum ada kebijakan luar negeri mengenai minyak bumi, yang produksi domestiknya di era tersebut masih bisa memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam negeri. (Green & Stabler, 2015)

#### A.2. Berakhirnya Politik Isolasi AS Setelah Perang Dunia I

Setelah Perang Dunia I berakhir, AS mulai dihadapkan pada masalah baru. Penyelidikan yang dilakukan oleh Senat di tahun 1916 menyebutkan bahwa produksi minyak di AS sudah melewati fase puncak dan diperkirakan cadangan minyak di AS hanya tersisa sampai dekade 1920an. Sementara itu, naiknya kegunaan kendaraan bermotor baru yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) seperti mobil, motor dan alutsista militernya menambah tingkat konsumsi terhadap produk turunan minyak bumi. Pasokan minyak produksi dalam negeri dikhawatirkan tidak dapat memenuhi konsumsi sehingga dapat berakibat negatif terhadap kestabilan ekonomi.

Untuk mengatasi masalah ini, AS mulai mengakhiri politik isolasinya dan menerapkan *Open Door Policy* atau kebijakan pintu terbuka, yaitu membuka akses untuk perusahaan-perusahaan minyak dalam negeri ke negara manapun dan memberikan bantuan secara diplomatik agar perusahaan asli AS bisa mendapat akses minyak dari pemerintahan negara lain. Langkah awal AS adalah berusaha untuk masuk ke Iraq, dimana perusahaan AS seperti Exxon, Socony, Gulf, Arco, dan Pan-American di tahun 1928

mendapat bagian dalam eksplorasi minyak di Iraq. (Maugeri, 2006) Sementara itu, di waktu bersamaan perusahaan seperti Chevron dan Gulf mendapatkan hak sewa tanah di Bahrain, dan di tahun 1932 berhasil memproduksi minyak bumi dalam jumlah bernilai komersial. Di tahun 1933, Raja Abdulaziz Ibnu Saud memberikan konsesi (pemberian sewa lahan untuk digunakan dalam kegiatan usaha) di wilayah provinsi Syarqiyah, Arab Saudi kepada Standard Oil of California (SoCal) selama 60 tahun, dimana nantinya cadangan minyak di wilayah ini diketahui sebagai yang terbesar di dunia. (McNally, 2017)

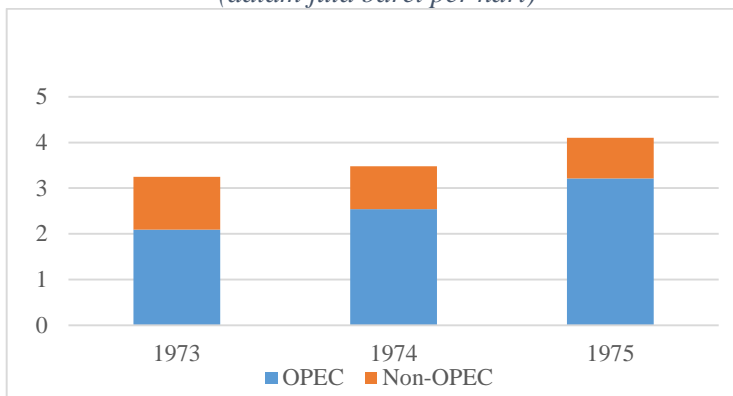
Di tahun 1929, bursa saham Wall Street Runtuh karena maraknya praktek spekulasi ekonomi. Peristiwa yang dikenal dengan istilah “Selasa Hitam” ini memicu kegagalan bank di AS dan negara-negara maju lainnya sehingga akhirnya memulai era depresi besar. Di era ini konsumsi minyak turun drastis dan menimbulkan *glut* atau kelebihan produksi di dalam negeri. Harga minyak mentah anjlok dari US\$ 2 per barel di tahun 1925 ke nilai dibawah US\$ 1 di tahun 1931. Pemerintah AS mencoba untuk menstabilkan harga minyak melalui penetapan *National Industry Recovery Act* di tahun 1933, yang melarang produksi berlebih minyak menurut kuota yang ditetapkan di tiap negara bagian dan juga memberlakukan tarif terhadap minyak bumi impor dari luar negeri. Harga minyak mulai pulih di tahun 1935, senilai US\$ 1 per barel dan bertahan sampai Perang Dunia II usai. (Maugeri, 2006)

### A.3. Krisis Energi 1973 dan Berlakunya Larangan Ekspor Minyak Bumi

Pada Oktober 1973, Perang Yom Kippur terjadi antara Mesir dan Suriah melawan Israel. Sikap AS yang mendukung Israel secara terang-terangan dengan segera menimbulkan respon negatif dari Dunia Arab yang sebagian anggotanya juga merupakan anggota OPEC. OPEC lalu menyatakan berlakunya embargo minyak terhadap AS sebagai bentuk protes terkait dukungan AS terhadap Israel. Di tahun 1973, AS mengimpor 2

juta barel minyak mentah dari negara-negara OPEC, 62,5% dari total keseluruhan impor minyak sebesar 3,2 juta barel. Embargo ini memicu krisis energi di akhir 1973, dimana kepanikan terjadi di masyarakat, yang ditandai dengan antrian panjang di banyak SPBU di AS serta adanya petisi untuk pemerintah agar menjatah BBM. Di tingkat makroekonomi, terjadi resesi sampai tahun 1975. (Engdahl, 2012)

*Grafik 2.1 Sumber impor minyak mentah AS 1973-1975  
(dalam juta barel per hari)*



*Sumber: U.S. Energy Information Administration, 2015*

Pemerintah merespon krisis energi dan resesi ekonomi ini dengan meloloskan kebijakan *Energy Policy and Conservation Act* (EPCA) di tahun 1975 untuk mengurangi ketergantungan AS terhadap minyak impor, mendirikan pasar bebas minyak bumi dan memberi dana riset dan pengembangan energi. EPCA juga membentuk *Strategic Petroleum Reserve* (SPR) untuk menjaga pasokan minyak AS di masa krisis, dan mewajibkan program efisiensi bahan bakar terhadap pelaku usaha industri otomotif. (Parra, 2004)

#### B. Nilai Strategis Minyak Bumi dalam Politik Luar Negeri

Dikarenakan posisinya sebagai komoditas vital dalam perdagangan internasional, minyak bumi sering digunakan

sebagai alat atau tujuan dari negara-negara dalam menjalankan agenda politik luar negerinya untuk kepentingan negara-negara tersebut. Negara-negara eksportir atau produsen minyak biasanya menjadikan minyak sebagai alat tawar dalam berdiplomasi, seperti dalam kesepakatan perdagangan internasional atau dalam pemberian konsesi terhadap perusahaan asing terkait pengelolaan sumur-sumur minyak di wilayah negara tersebut.

Minyak bumi juga bisa digunakan dalam menekan negara-negara importir minyak untuk menuruti permintaan dari negara-negara penekan, dimana tekanan tersebut dapat berupa penetapan harga yang lebih tinggi maupun embargo dengan tujuan mengganggu kestabilan ekonomi di suatu negara. Sementara negara-negara importir atau konsumen minyak biasanya menerapkan suatu strategi geopolitik tertentu untuk menjaga impor minyak tetap masuk ke negaranya sehingga kestabilan ekonominya tetap terjaga. Strategi geopolitik tersebut dapat berupa kedekatan hubungan bilateral dengan negara-negara di wilayah penghasil minyak seperti dukungan AS terhadap suatu rezim tertentu maupun konfrontasi berupa perang atau dukungan untuk pemberontak di negara-negara yang dianggap sebagai ancaman. Sub-bab ini akan membahas mengenai contoh kasus dimana minyak bumi digunakan sebagai alat tawar, ancaman, atau tujuan politik geostrategi.

### B.1. Minyak Bumi Sebagai Alat Tawar

Dikarenakan tidak semua negara di dunia menghasilkan minyak bumi dan permintaan dunia yang tinggi terhadapnya, Minyak bumi memiliki peran sebagai alat tawar dari negara-negara penghasil minyak dalam menguatkan posisinya dalam negoisasi dengan negara lain atau perusahaan asing terkait kebutuhan dari negara atau perusahaan asing tersebut untuk mendapatkan akses minyak di negara-negara penghasil minyak tersebut dengan kompensasi tertentu untuk negara penghasil minyak seperti pemberian bantuan, penukaran dengan suatu komoditas tertentu, royalti atau

transfer teknologi. Kuat atau lemahnya minyak bumi sebagai alat tawar sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar dunia, dimana semakin besar permintaan akan minyak membuat posisi negara-negara penghasil minyak dalam bernegosiasi akan semakin kuat. (Franks & Nunnally, 2011)

Di Jazirah Arab, Kerajaan Arab Saudi berdiri pada 23 September 1932, melalui proses penyatuan antara wilayah Hijaz dan Najid. Kerajaan ini awal mulanya mengalami kemunduran ekonomi dikarenakan Depresi Besar yang dimulai di tahun 1929. Kerajaan ini dalam kesulitan ekonomi karena menurunnya jumlah jamaah haji yang datang selama Depresi Besar. Ketika para geolog Britania menemukan potensi cadangan minyak di wilayah Bahrain, Raja Abdulaziz atau yang lebih dikenal barat sebagai Ibnu Saud melihat peluang masuknya penanaman modal ke negaranya.

Di tahun 1932 perusahaan Standard Oil of California (SoCal) meminta izin eksplorasi minyak di wilayah provinsi Syarqiyah, Raja Abdulaziz menginginkan adanya kesepakatan konsesi terlebih dahulu sebelum eksplorasi dilakukan. Hal ini untuk memastikan Arab Saudi mendapatkan dana segar dengan seketika untuk memperbaiki kondisi ekonominya saat itu. (Maugeri, 2006) Konsesi tersebut akhirnya disetujui pada 23 Mei 1933, dimana disebutkan bahwa SoCal mendapat hak eksklusif selama 60 tahun untuk mengeksplorasi wilayah provinsi Syarqiyah dengan kompensasi perusahaan berupa pinjaman emas senilai 30.000 poundsterling yang dibayar segera, ditambah kewajiban untuk memberi royalti senilai 50.000 poundsterling apabila minyak ditemukan dalam jumlah yang bernilai komersial. Perusahaan California-Arabian Standard Oil Company (CASOC; sekarang Saudi Aramco) pun didirikan.

Meski konsesi ini dalam jangka panjang jauh lebih menguntungkan pihak perusahaan asing, namun setidaknya Arab Saudi dapat mulai memperbaiki keadaan ekonominya saat itu. Minyak dalam jumlah besar sendiri baru ditemukan di tahun 1938, dimana secara perlahan Arab Saudi mulai bertransformasi sebagai negara penting di kancah politik

internasional dikarenakan posisi barunya sebagai negara penghasil minyak. (Vassiliev, 2000)

Dalam kasus lainnya, minyak bumi bisa berperan menggantikan mata uang asing dalam perdagangan internasional, dimana minyak bumi dari suatu negara bisa ditukar dengan komoditas lainnya yang diinginkan oleh negara tersebut. Pada tahun 2014, Iran dan Rusia sedang mendapatkan sanksi ekonomi dari negara-negara barat dikarenakan alasan yang berbeda. Iran melakukan kegiatan pengayaan uranium di tengah dugaan bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir secara sembunyi-sembunyi, sementara Rusia saat itu telah melakukan penyerbuan ke wilayah Krimea di Ukraina dan mendudukinya

Kedua negara yang merupakan sekutu dekat ini kemudian membuat sebuah kesepakatan pada 5 Agustus 2014, dimana Menteri Energi Rusia Aleksandr Novak bersama dengan Menteri Minyak Bumi Iran Bijan Namdar Zanganeh menyepakati nota kesepahaman selama lima tahun ke depan. (RT, 2014) Terkandung kontrak di kesepakatan ini yang menyebutkan bahwa Rusia akan membeli sebanyak 500.000 bph dari Iran mulai dari 2015, dimana minyak tersebut akan ditukar dengan pasokan mesin, barang jadi, dan hasil pertanian dari Rusia. (*idem*) Diperkirakan kesepakatan pertukaran minyak bumi Iran dan barang-barang Rusia ini bisa bernilai sampai US\$ 2,35 Milyar per tahunnya. (*idem*)

Kesepakatan antara kedua negara ini dimaksudkan untuk mengurangi beban masing-masing dari pemberlakuan sanksi dunia barat saat itu. Rusia dan Iran dapat tetap menjalankan kepentingan nasionalnya masing-masing tanpa adanya gangguan dari pihak luar. Kesepakatan ini juga dapat menguatkan posisi Iran di perundingan internasional yang membahas mengenai kegiatan pengayaan uranium Iran, dimana Iran dapat menyatakan posisi yang lebih tegas terhadap negara-negara barat untuk tidak mengganggu program nuklirnya. (Yuzik, 2014) Sementara itu Rusia mendapat keuntungan melalui terbukanya pasar alternatif untuk ekspor



yang dapat membantu meringankan embargo dari negara-negara barat. (*idem*)

## B.2. Minyak Bumi Sebagai Alat Ancaman

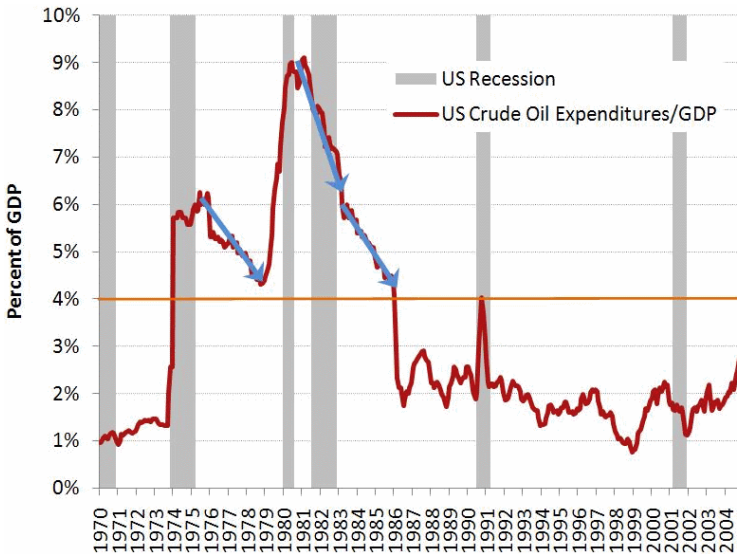
Selain perannya sebagai alat tawar dari negara-negara penghasil minyak, minyak bumi juga kadang digunakan sebagai alat ancaman oleh negara-negara tersebut untuk menekan negara-negara importir minyak agar mau menuruti keinginan politik tertentu dari negara-negara penghasil minyak. Ancaman tersebut berupa tindakan embargo yang menutup akses minyak terhadap negara importir. Di negara-negara importir minyak, embargo dapat memicu terjadinya kelangkaan minyak yang mengganggu kelancaran ekonomi di dalam negeri, dan pada akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya resesi dan inflasi. (Herbstreuth, 2015)

Sebagaimana telah dibahas dalam sub-bab sebelumnya, keberpihakan AS dan sebagian negara-negara Eropa Barat dalam Perang Yom Kippur pada Oktober 1973 mengakibatkan negara-negara Arab anggota OPEC memberlakukan embargo terhadap AS. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, AS memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap minyak impor dari negara-negara OPEC, dimana di tahun 1973, AS mengimpor 2 juta barel minyak mentah dari negara-negara OPEC, atau 62,5% dari total keseluruhan impor minyak sebesar 3,2 juta barel.

Embargo ini diberlakukan setelah negara-negara OPEC sebelumnya sepakat untuk menaikkan harga minyak dari US\$ 3,01 ke 5,11 per barel. Abu Dhabi, Aljazair, Arab Saudi, Iraq, Kuwait, Libya, dan Qatar secara bersamaan menyatakan bahwa negara-negara tersebut akan terus memotong produksi 5% setiap bulannya mulai dari Oktober 1973, sampai Israel menarik mundur seluruh pasukannya dari setiap wilayah Arab yang didudukinya (semenanjung Sinai, Jalur Gaza, Tepi Barat dan dataran tinggi Golan) setelah Perang Enam Hari di tahun 1967 berakhir. Tuntutan lainnya adalah Israel harus mengembalikan hak-hak hukum warga Palestina. (Engdahl, 2012)

Efek dari embargo ditambah tingginya harga minyak ini memicu krisis energi di akhir tahun 1973, yang dilanjutkan oleh resesi ekonomi yang melanda AS dan sebagian negara-negara Eropa Barat. AS dilanda kelangkaan produk seperti bensin. Bursa Wall Street runtuh di akhir 1973, sementara tingkat pengangguran naik dari 4,8% ke 8,9%. Inflasi naik dari 7% ke 12,1% di tahun 1975. Fenomena ini dikenal dengan nama *stagflation*, yaitu stagnasi ekonomi yang dibarengi dengan naiknya tingkat inflasi di suatu negara.

*Grafik 2.2 Persentase pengeluaran minyak bumi dari jumlah PDB AS*



*Sumber: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2005*

Embargo ini berhenti di tahun 1974, dikarenakan kerugian yang didapat negara-negara pelaku embargo. Resesi ini menyebabkan AS menekan Israel untuk berdamai dengan negara-negara Arab dengan syarat pengakuan kedaulatan Israel. Saat itu hanya Mesir yang siap berunding sesuai syarat. Perjanjian damai antara Mesir dan Israel akhirnya disepakati

pada Maret 1979, dengan ketidaksetujuan negara-negara Arab lain, dimana Mesir mengakui kedaulatan Israel dan Israel menarik seluruh pasukannya dari semenanjung Sinai. (Maugeri, 2006)

### B.3. Minyak Bumi Sebagai Tujuan Politik Geostrategi

Dalam hubungan internasional, suatu negara yang menjalankan politik geostrategi, yaitu politik pertimbangan strategis dengan faktor geopolitik dari suatu wilayah, penguasaan akses akan minyak bumi di wilayah tertentu merupakan salah-satu tujuan dari negara-negara yang menjalankan politik tersebut. Tersedianya pasokan minyak bumi yang konstan dari suatu wilayah tertentu akan menjaga keamanan nasional, kestabilan ekonomi, dan status negara tersebut di mata dunia internasional, khususnya untuk negara-negara berkekuatan besar. Tujuan politik geostrategi tersebut dapat dicapai melalui cara-cara damai dan diplomatis seperti kesepakatan antar negara maupun perang. (Mahdi, 2012)

Pada 11 September 2001, terjadi tragedi 9/11 yang merenggut nyawa hampir 3.000 orang di Kota New York, dan memicu deklarasi perang AS terhadap terorisme. Sasaran pertama dari perang tersebut adalah Afghanistan, yang pemerintahannya dianggap melindungi teroris seperti Al-Qaidah. Setelah pemerintahan Thaliban dijatuhkan pada pertengahan 2002 dan basis militer AS didirikan disana, AS melihat Iraq sebagai potensi target selanjutnya. Iraq dianggap memiliki kaitan dengan Al-Qaidah dan menyimpan senjata pemusnah masal (WMD) khusus. Rencana AS untuk menyerbu Iraq ini ditentang oleh Rusia dan Tiongkok. Rusia memiliki kontrak 23 tahun untuk mengembangkan ladang minyak di Qurna Barat, sementara Tiongkok dengan perusahaan BUMNnya *China National Petroleum Corporation* (CNPC) memiliki kontrak eksplorasi di bagian barat Iraq.

AS menyerbu Iraq pada Maret 2003 dan pemerintahan Saddam Hussein jatuh dua bulan kemudian. Ketika inspeksi dari PBB tidak menemukan senjata pemusnah masal yang

diklaim oleh AS, sementara Sekretaris Negara AS Colin Powell akhirnya mengaku bahwa tidak ada senjata pemusnah masal dan bukti kaitan dengan Al-Qaidah di Iraq. Hal ini menciptakan persepsi dari dunia luar seperti anggota parlemen Britania Raya, Michael Meacher yang menyatakan bahwa perang terhadap terorisme hanyalah kedok AS untuk mewujudkan tujuan politik geostrateginya di Timur Tengah.

Setelah perang Iraq berakhir, perusahaan-perusahaan minyak seperti Chevron, Texaco, BP, Shell, dan Halliburton masuk ke Iraq. Dengan akses minyak dari Iraq, AS bisa dipastikan unggul secara ekonomi dari semua negara pesaingnya seperti Rusia, Tiongkok, dan Prancis. Dari segi militer, AS kini memiliki basis militer di Afghanistan, Arab Saudi, Iraq, Kuwait, Kyrgyzstan, Qatar, dan Uzbekistan. Hal ini menjadikan AS memiliki posisi kuat di Timur Tengah dan Asia Tengah, dimana AS bisa melancarkan serangan langsung terhadap Rusia atau Tiongkok apabila terjadi perang dengan kedua negara tersebut. (Engdahl, 2012)

Kasus lainnya terjadi di kawasan Asia Tengah. Asia Tengah adalah kawasan yang kaya akan sumber daya alam, dan berlokasi strategis sebagai penghubung dari kawasan Eropa Timur, Asia Timur sampai Asia Selatan. Selain dari pengaruh kuat yang dimiliki oleh Rusia sebagai negara pewaris Uni Soviet di kawasan ini, negara-negara industri baru yang bersebelahan seperti India dan Tiongkok mulai mencoba untuk memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut. Kedua negara secara sejarah memiliki hubungan erat dengan Asia Tengah, dimana perpindahan manusia, ilmu, budaya, dan agama di Asia Tengah berasal dari kedua negara tersebut.

Kedua negara memiliki motif yang mirip sebagai alasan untuk memperluas pengaruhnya di kawasan ini, yaitu mengamankan akses SDA yang melimpah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, membuka pintu perdagangan di negara-negara Asia Tengah, dan memudahkan jalur komunikasi darat dengan Rusia. Dalam proses negosiasi kedua negara untuk mengamankan ladang minyak di Kazakhstan, India dikalahkan oleh Tiongkok, dimana di pertengahan tahun

2013 Kazakhstan sepakat untuk menjual 8,3% kepemilikan ladang minyak Kashagan yang terletak di wilayah utara Laut Kaspia. (PTI, 2013) Hal ini mengakibatkan hilangnya kesempatan India untuk mendapatkan keuntungan dari minyak bumi yang diproduksi di wilayah ini, dimana setidaknya terdapat 9 milyar barel cadangan minyak yang bisa diproduksi dengan segera. (Gordeyeva, 2013)

Sementara itu kemenangan Tiongkok memudahkan untuk mengamankan proyek-proyek besar lain di Asia Tengah seperti jalan raya, pipa gas dan minyak, atau sarana komunikasi, sebagai bagian dari rencana Tiongkok untuk membangun kembali “Jalur Sutra Baru” yang menyambungkan Asia Timur dengan Eropa Barat, dimana Tiongkok berencana memainkan peran utama dalam kegiatan ekonomi di sepanjang jalur tersebut. (Jiao, 2013) Apabila hal ini terwujud, pengaruh Tiongkok di Asia Tengah akan semakin kuat dimana Tiongkok dapat lebih mudah mendapat akses SDA yang melimpah di kawasan ini, sekaligus memiliki kendali lintas darat ekonomi antara Rusia, Eropa Timur, dan Asia Selatan. (Lee, 2010)

### C. Korelasi Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Migas

Minyak bumi sebagai salah-satu komoditas andalan sektor migas memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara, dimana fluktuasi harga minyak dunia sering mempengaruhi pertumbuhan negara-negara eksportir maupun importir. Naik dan turunnya harga minyak dunia memberi dampak ganda yang bisa berupa dampak positif maupun negatif, berdasar pada situasi pertumbuhan ekonomi dunia di suatu waktu tertentu. Kenaikan dari harga minyak dunia akan memberikan keuntungan untuk negara-negara pengekspor jika permintaan tetap tinggi, namun malah memberikan kerugian terhadap negara-negara pengimpor minyak bumi yang perekonomiannya kecil. Sedangkan penurunan harga minyak dunia akan membantu pertumbuhan ekonomi negara-negara pengimpor, namun melukai penghasilan dari negara-negara pengekspor minyak, juga

mengurangi penanaman modal di sektor migas karena dianggap tidak menguntungkan.

Korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan sektor migas di suatu negara bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu indikator makroekonomi, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan. Dikarenakan permintaannya yang berada di jumlah yang besar serta cakupannya dalam skala global, minyak bumi dapat mengubah perekonomian suatu negara, terutama negara yang memiliki kemampuan untuk memproduksi komoditas ini dan mengekspornya dalam jumlah yang besar. Untuk negara-negara pengekspor minyak, sektor migas merupakan salah-satu tulang punggung utama yang memberi banyak kontribusi bagi PDB, penyediaan lapangan kerja, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sub-bab ini akan membahas mengenai contoh-contoh kasus mengenai bagaimana dampak sektor migas terhadap perekonomian di suatu negara.

### C.1. Korelasi Antara Pertumbuhan Makroekonomi dan Sektor Migas

Minyak bumi merupakan komoditas yang mampu mengubah perekonomian di suatu negara karena sifatnya yang dibutuhkan secara universal. Dalam menyoroti bagaimana pertumbuhan makroekonomi di suatu negara dipengaruhi sektor migas, penulis akan menyoroti kasus yang terjadi Rusia selama 30 tahun kebelakang. Pada tahun 1991 ketika Uni Soviet bubar, keadaan ekonomi Rusia sedang buruk, dimana negara baru ini harus mewarisi hutang luar negeri sejumlah US\$ 66 Milyar. Sektor migas yang dahulunya menjadi andalan Uni Soviet tidak dapat berkembang karena buruknya birokrasi, efisiensi serta penerapan teknologi saat itu yang membuat Uni Soviet selalu menderita defisit di neraca perdagangan di tahun-tahun terakhirnya sebelum bubar. (Boughton, 2012)

Di tahun 2003, Rusia mengubah kebijakannya terkait strategi energi, untuk meningkatkan kemampuan, kualitas, dan efisiensi produksi energinya. (Ministry of Energy of the Russian Federation, 2003) Perubahan kebijakan ini berdampak pada meningkatnya sumbangan sektor migas terhadap PDB

Rusia, dimana Rusia mampu meningkatkan PDB dari sektor migas dari senilai US\$ 79,2 Milyar di 2003 menjadi US\$ 457 Milyar di tahun 2013. (Hays, 2013) Selama 10 tahun tersebut migas yang diproduksi Rusia berada di urutan kedua dunia setelah produksi Arab Saudi. Sektor migas telah membantu memulihkan perekonomian Rusia dimana hutang luar negeri Rusia yang sebelumnya bernilai 60% dari PDB di tahun 2000 turun menjadi hanya 25% dari PDB di tahun 2014. (Focus Economics, 2018) PDB per kapita Rusia yang sebelumnya hanya bernilai US\$ 6.000 di tahun 2000 naik pesat menjadi US\$ 11.000 di tahun 2013, dimana di tahun itu Bank Dunia menetapkan Rusia sebagai negara berpendapatan tinggi (*high-income economy*). (World Bank, 2013)

Di AS sendiri minyak bumi memiliki kontribusi yang relatif kecil namun signifikan terhadap perekonomian. Sektor migas di tahun 2015 hanya menyumbang 7,2% dari jumlah PDB AS. Industri hulu yang terkait dengan ekstraksi minyak bumi hanya menyumbang 1,1% dari jumlah PDB, sedangkan 6,4% dari PDB berasal dari industri hilir dan distribusi minyak. Namun dampak terbesar dari berkembangnya sektor migas di AS adalah kemudahan akses untuk mendapatkan minyak bumi di AS meningkat, dimana kemudahan ini akan membantu para pelaku industri di sektor lain dalam menjalankan bisnis, yang dalam jangka panjang akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi AS. (PricewaterhouseCoopers, 2017)

*Tabel 2.1 Sumbangsih sektor migas terhadap PDB AS (dalam US\$ triliun)*

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
PDB AS	15,5179	16,1553	16,6915	17,3931	18,0366
Sektor migas	0,2525	0,2674	0,3132	0,3382	0,2062

Persentase	1,39%	1,62%	1,65%	1,87%	1,14%
------------	-------	-------	-------	-------	-------

*Sumber: U.S. Bureau of Economic Analysis, 2015*

## C.2. Korelasi Antara Ketenagakerjaan dan Sektor Migas

Di negara-negara pengekspor minyak bumi, sektor migas merupakan sektor yang berpotensi memberikan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar terhadap para penduduk di negara tersebut. Besarnya peluang penduduk untuk bekerja di sektor migas ditentukan oleh tingkat kegiatan di sektor migas yang dipengaruhi oleh harga minyak dunia dan permintaan pasar dunia di suatu waktu. Contohnya adalah kasus yang terjadi di Arab Saudi, dimana sektor migas telah mengubah keadaan penduduk Arab Saudi yang sebelumnya banyak hidup secara nomaden menjadi menetap serta menjadi tenaga profesional di sektor tersebut. Setelah adanya kesepakatan konsesi antara Arab Saudi dengan SoCal untuk mendirikan perusahaan CASOC di wilayah Dhahran, CASOC mulai mempekerjakan masyarakat Arab Badui lokal untuk dapat mendukung kegiatan sektor migas, melalui pembangunan pelabuhan modern, jalan raya, kompleks perumahan, pembangkit listrik, dan sistem pengairan. (U.S. Library of Congress, 1993)

Perubahan masyarakat yang terjadi di Arab Saudi berlangsung perlahan di akhir Perang Dunia kedua, dimana Arab Saudi membuat kesepakatan baru dengan dengan CASOC, yang saat itu sudah berganti nama menjadi Arabian American Oil Co. (Aramco) untuk membagi hasil 50:50 dari keuntungan produksi minyak bumi. (Pearson Education, 2005) Setahun kemudian, ladang minyak Safaniya dan Ghawar ditemukan di wilayah Provinsi Timur, dimana kedua ladang minyak menyimpan cadangan minyak terbesar di dunia saat itu. Penemuan ini semakin meningkatkan aktivitas produksi minyak bumi di Arab Saudi, dimana semakin banyak dari warga Badui lokal yang menetap di wilayah ladang minyak dan mulai bekerja di proyek seperti jalur pipa lintas Arabia yang menghubungkan Dhahran serta wilayah Arab Saudi

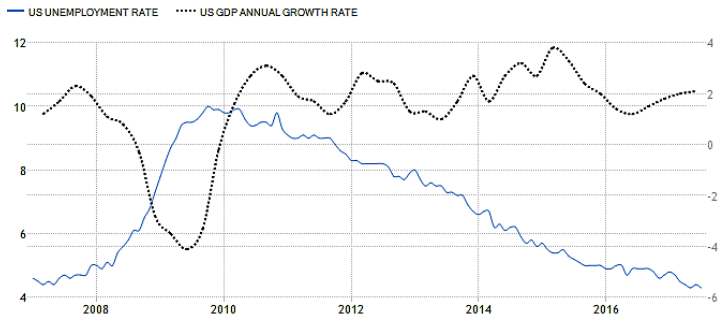


Utara dengan pelabuhan besar di Kota Sayda di Libanon, untuk memudahkan pengiriman minyak bumi ke Eropa dan AS. (Al-Mashriq, 2000)

Pertumbuhan ekonomi Arab Saudi yang berjalan seiring dengan kemajuan sektor migasnya pada akhirnya telah mengubah pola hidup sebagian masyarakatnya terutama suku Arab Badui yang sebelumnya berpindah-pindah menjadi menetap di wilayah-wilayah ladang minyak. (Polk, 1982) Untuk menutupi kekurangan tenaga kerja lokal yang bekerja di sektor migas, Arab Saudi menetapkan suatu kebijakan bernama Saudisasi, dimana kebijakan ini menetapkan kuota lapangan kerja antara pekerja lokal dan asing di sektor migas, sehingga pekerja asing bisa datang ke Arab Saudi dan bekerja tanpa harus bersaing dengan pekerja lokal. (Madhi, 2003) Hal ini menjadikan Arab Saudi sebagai negara yang menarik untuk pekerja yang memiliki keahlian di sektor migas.

Jika dibandingkan dengan AS di tahun 2015, sekitar 2,8 juta penduduk AS bekerja di sektor industri migas, atau senilai 1,2% dari jumlah tenaga kerja di usia produktif senilai 148 juta jiwa di awal tahun 2015. (*idem*). Sementara itu tingkat pengangguran di AS sekitar 5,7% dari jumlah penduduk di usia produktif. AS mengalami penurunan jumlah pekerjaan di sektor pertambangan termasuk migas, dimana 129.000 pekerjaan di sektor ini hilang sepanjang tahun 2015. (Bureau of Labor Statistics, 2016)

*Grafik 2.3 Perbandingan antara tingkat pertumbuhan PDB tahunan dan pengangguran AS*



Sumber: Trading Economics, United States Unemployment Rate

Apabila terjadi fenomena minyak global seperti *glut* atau produksi minyak bumi berlebih yang dapat mengakibatkan harga minyak dunia turun drastis, para pelaku usaha di bidang migas akan mencoba untuk menghindari kerugian yang bisa didapat dari biaya produksi dalam proses ekstraksi minyak bumi. Dikarenakan minyak bumi hasil produksi dalam negeri di AS dilarang untuk diekspor, maka para pelaku usaha akan menurunkan produksi minyak bumi untuk menjaga kestabilan harga di dalam negeri sampai harga minyak global kembali naik. Penurunan produksi ini akan membawa dampak negatif terhadap pendapatan PDB AS dan ketenagakerjaan, dimana pendapatan PDB AS dari industri migas akan menurun dan para pekerja di sektor migas terancam pemutusan hak kerja (PHK) kapanpun apabila fenomena *glut* terus berlanjut. Namun jika AS tidak melarang ekspor minyak bumi, maka para pelaku usaha dapat menemukan pasar potensial di luar negeri dimana mereka bisa menjual minyak bumi yang diproduksi tersebut.

### C.3. Korelasi Antara Kesejahteraan dan Sektor Migas

Sebagai salah-satu komoditas terbesar yang diperdagangkan secara global, minyak bumi bisa menjadi penyumbang PDB terbesar untuk suatu negara, terutama negara-negara pengekspor minyak. Negara-negara ini banyak

memanfaatkan hasil dari penjualan minyak bumi ke luar negeri untuk mendanai rencana pembangunan atau sosial yang diwujudkan. Ketika Hugo Chavez menjadi Presiden Venezuela di tahun 1998, ia mulai menjalankan kebijakan-kebijakan sosialis sebagai respon dari kurangnya keuntungan ekspor minyak bumi yang disalurkan ke rakyat Venezuela di pemerintahan sebelumnya. Chavez mulai mengalihkan uang hasil ekspor minyak bumi untuk memudahkan akses pendidikan dan kesehatan untuk rakyat Venezuela, juga menciptakan banyak lapangan kerja baru. (Weisbrot, 2009)

Kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh Chavez diatas berhasil membuat Venezuela meningkatkan kesejahteraannya, dimana tingkat kemiskinan berkurang dari 54% rumah tangga di tahun 2003 menjadi 26% di tahun 2008. (*idem*) Tingkat kesenjangan yang diukur dari koefisien Gini berkurang dari nilai 47 di tahun 1999 menjadi 41 di tahun 2008. (*idem*) Keberhasilan Venezuela menjalankan kebijakan-kebijakan sosial ini dikarenakan tersedianya dana yang besar dari ekspor minyak bumi yang harganya mencapai US\$ 100 sebelum resesi besar. (Smith J. , 2009) Di sisi lain, keadaan ini membuat kepopuleran Chavez tetap tinggi di Venezuela yang membuatnya terpilih kembali sebagai Presiden di Pemilu tahun 2012. (Weisbrot, Why Chávez Was Re-elected, 2012)

Dari pembahasan bab ini dapat disimpulkan bahwa minyak bumi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan alur kebijakan luar negeri AS yang sangat bergantung pada ketersediaan minyak bumi yang diimpor dari negara-negara penghasil minyak untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya di dalam negeri. Kelangkaan minyak di dalam negeri dapat mengakibatkan terjadinya resesi ekonomi dan melonjaknya inflasi di AS. Oleh karenanya sangat penting untuk AS agar dapat mempertahankan akses minyak dari suatu wilayah tertentu untuk melindungi kestabilan ekonomi, menghindari ancaman yang dapat diberikan dari negara-negara yang mengeksport minyak ke AS serta menjaga status hegemoninya di dunia internasional sebagai negara adidaya.

Dengan mempertimbangkan aspek sejarah dan nilai strategis minyak bumi di atas, pemerintah AS akan membuat kebijakan terkait yang diproyeksi akan berdampak positif terhadap kestabilan dan perkembangan ekonominya, dengan mempertimbangkan faktor dalam negeri dan politik internasional. Kebijakan terkait minyak bumi yang diterapkan oleh pemerintah AS tersebut nantinya akan dibahas di bab selanjutnya, yang memfokuskan pembahasan mengenai dinamika kebijakan ekspor minyak bumi AS ke luar negeri.